

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PERJALANANDINAS DI KANTOR BUPATI PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh

SURYA ABADI

1510012111244

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 10/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Surya Abadi
NPM : 1510012111244
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Di Kantor Bupati Pesisir Selatan

Telah disetujui Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Dning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


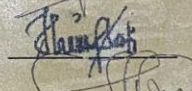
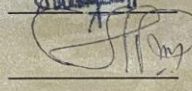
PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 10/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Surya Abadi
NPM : 1510012111244
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Di Kantor Bupati Pesisir Selatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI KANTOR BUPATI PESISIR
SELATAN**

Surya Abadi¹ Dr.Sanidjar Pebrihariati.R.S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum¹

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹

E-mail suryaabadii201@gmail.com

Abstrak

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang di laksanakan oleh karyawan atau pegawai suatu instansi yang berkaitan dengan tugas perjalanan kedinasan. Tugas Perjalanan Dinas adalah tugas yang berkaitan dengan kepentingan Lembaga Instansi yang bersangkutan seperti seminar, diklat, penjajakan kerja sama, menghadiri acara seremonial, kegiatan sosial dan lain-lain Dokumen yang harus di wajibkan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Tugas (SPT), surat undangan, di sposisi dan bukti kas keluar. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1). Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan. 2). Apa sajakah Kendala – kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 3). Untuk menganalisa upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pemerintah Pesisir Selatan dalam mengatasi Kendala dan penerapan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan. Jenis penelitian adalah Hukum Sosiologis, Teknik Pengumpulan Data, Studi Dokumen, Wawancara, dan Analisa Data. Hasil penelitian adalah : 1). Penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan. 2). Kendala – kendala yang di hadapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 3). Upaya – upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala dan penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan.

Kata Kunci : Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan umum tentang prosedur perjalanan dinas.....	9
1.. Pengertian pemerintah daerah.....	9
2.. Pengertian Peraturan Bupati.....	11
3.. Pengertian perjalanan dinas.....	14
B. Tinjauan umum tentang Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2020 tentang sistem dan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	26
1. Pengertian sistem dalam pelaksanaan perjalanan dinas.....	26
2. Pengertian prosedur dalam pelaksanaan perjalanan dinas.....	26
3.. Pembagian dari perjalanan dinas.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan	

Pemerintah Pesisir Selatan.....	34
B..Kendala – kendala yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	37
C..Upaya – upaya yang di lakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala dan penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan pemerintah Pesisir Selatan.....	44
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Simpulan.....	50
B..Saran	50
DAFTAR KE PUSTAKAAN.....	